



KEPEMIMPINAN AHOK: REVOLUSI GAYA YANG MENGGERAKKAN PERUBAHAN DALAM PEMERINTAHAN

AHOK'S LEADERSHIP: A REVOLUTIONARY STYLE DRIVING CHANGE IN GOVERNANCE

Vanny Vadilla Mendra¹, Apriyana Rahayu², Deti Rahmah Hidayati³, Yulia Hanoselina⁴, Rizki Syafril⁵

Universitas Negeri Padang

Email: vannyvadilla.0102@gmail.com¹, rahayu201882@gmail.com², rahmahhidayatidet@gmail.com³, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁴, rizkisyafri@fis.unp.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 08-05-2025

Revised : 10-05-2025

Accepted : 12-05-2025

Published : 14-05-2025

Abstract

The leadership revolution of Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) during his tenure as Governor of Jakarta from 2014 to 2017 brought significant impacts on government management in Indonesia. This paper examines three key aspects of Ahok's leadership: decisiveness in policy implementation, comprehensive transparency in administration, and innovation in enhancing public participation. Ahok's firm, transparent, and disruptive approach has driven changes in Jakarta's bureaucracy, although it has also led to social and political polarization. This study reviews controversial policies such as the clearing of illegal areas and the relocation of settlements along rivers, as well as the implementation of e-budgeting and the Qlue app to improve government accountability and responsiveness. Through this analysis, the paper offers a new perspective on how a leadership style revolution can trigger systemic changes in governance, despite facing various challenges and complex cultural resistance.

Keywords: *Leadership Revolution, Bureaucratic Transformation, Public Transparency, Government*

Abstrak

Revolusi kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2014 hingga 2017 telah membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tiga aspek utama dari kepemimpinan Ahok: ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan, transparansi menyeluruh dalam administrasi, dan inovasi dalam meningkatkan partisipasi publik. Pendekatan Ahok yang tegas, terbuka, dan mengganggu telah mendorong perubahan dalam birokrasi Jakarta, meskipun juga menimbulkan polarisasi sosial dan politik. Penelitian ini meninjau kebijakan-kebijakan kontroversial seperti penertiban area ilegal dan pemindahan pemukiman di sepanjang sungai, serta penerapan sistem e-budgeting dan aplikasi Qlue untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah. Melalui analisis ini, artikel ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana revolusi gaya kepemimpinan dapat memicu perubahan sistemik dalam pemerintahan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan budaya yang rumit.

Kata Kunci: *Revolusi Kepemimpinan, Transformasi Birokrasi, Transparansi Publik*

PENDAHULUAN

Dalam arena politik dan administrasi, metode kepemimpinan yang efektif memiliki peranan yang sangat fundamental dalam mendorong kemajuan sebuah wilayah. Salah satu pemimpin yang



menerapkan metode kepemimpinan yang inovatif dan mengubah adalah Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dengan Ahok, yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2014 hingga 2017. Kepemimpinan Ahok tidak hanya terkenal karena keberaniannya dalam menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga karena cara transformatifnya yang berorientasi pada hasil.

Sebagai sosok pemimpin, Ahok menonjol dengan pendekatan yang tegas, berani membuat keputusan luar biasa untuk meningkatkan kondisi Jakarta. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah mengedepankan perbaikan infrastruktur serta perencanaan kota untuk mengatasi masalah klasik seperti banjir dan kemacetan. Ahok memimpin dengan prinsip keterbukaan dan transparansi, terlihat dari kebijakan-kebijakan inovatifnya, seperti penggunaan aplikasi untuk melaporkan isu publik dan sistem anggaran yang terbuka. Pendekatan ini mencerminkan komitmennya dalam mengelola anggaran secara efektif dan menghindari praktik korupsi yang sering kali menghalangi kemajuan pemerintahan.

kepemimpinan Ahok merupakan contoh perubahan dalam cara pandang seorang pemimpin dalam mengatasi isu-isu. Metode kepemimpinan yang ia jalankan berhasil membawa Jakarta menuju transformasi signifikan di berbagai dimensi kehidupan kota, mulai dari peningkatan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat melalui teknologi. Dengan menekankan prinsip transparansi, Ahok berhasil membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya, menjadikan masyarakat melihat pemerintah sebagai entitas yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Ahok juga menunjukkan bahwa perubahan signifikan sering kali datang bersama tantangan yang besar. Meskipun ia sering kali menerima kritik dan rintangan, setiap langkah yang diambilnya terfokus pada satu tujuan inti: menciptakan Jakarta yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa meski cara kepemimpinan Ahok berbeda dari kebanyakan pemimpin lainnya, pendekatannya yang berfokus pada perubahan nyata dan peningkatan kualitas hidup warganya membuktikan bahwa metode kepemimpinan yang berani dan inovatif dapat memberikan dampak positif.

Melalui Penelitian ini ingin mengajak pembaca untuk memahami lebih dalam bagaimana gaya kepemimpinan Ahok berkontribusi terhadap dinamika sosial dan politik di Jakarta. Kepemimpinan Ahok membuktikan bahwa revolusi dalam pendekatan kepemimpinan bisa menjadi kunci dalam menghadapi tantangan modern dalam pemerintahan, sembari tetap memelihara transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. Metode kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan ini memberikan pelajaran bahwa meskipun kontroversial, pendekatan yang tegas dan berani bisa membawa perubahan besar bagi masyarakat dan wilayah yang dipimpinnya. Ahok juga menerapkan prinsip transparansi dalam suatu pemerintahannya yang mana tujuan untuk mengutamakan transparansi dalam mengelola anggaran dalam pelaksanaan program pemerintah, yang mana menghindari praktik korupsi dan meningkatkan Transparansi kinerja dihadapan masyarakat (Abadi, 2016). Melalui berbagai ide atau gagasan yang baru seperti penggunaan aplikasi untuk melaporkan masalah publik dan sistem anggaran yang terbuka, dan Ahok berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang gaya kepemimpinannya Basuki Thaja Purnama, yang sering ditandai dengan ketegasan, Transparan dan terbuka, serta dampak terhadap perubahan wajah Jakarta. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana kepemimpinan Ahok berkontribusi pada dinamika sosial dan politik yang ada



di Jakarta, serta mengambil pelajaran dari gaya kepemimpinannya yang kontroversial namun sangat berpengaruh terhadap perubahan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur, yang berfokus pada analisis gaya kepemimpinan Basuki Thahaja Purnama selama masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta 2014-2017. Metode tinjauan literatur ini dipilih untuk memungkinkan studi yang komprehensif dari berbagai sumber yang terdokumentasi untuk kepemimpinan Ahok dan dampaknya terhadap perubahan Jakarta. Proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh berbagai sumber bacaan, termasuk jurnal ilmiah, dan artikel media massa serta menggunakan *google scholar* untuk mencari jurnal yang membahas terkait dengan kepemimpinan Ahok, untuk keterlibatan dalam proses penelitian. Saat melakukan analisis, penelitian ini menggunakan teknik *literatur review* pada beberapa tahap yang terstruktur.

Tahap pertama adalah identifikasi dan kumpulan sumber literatur yang terkait dengan topik yang berkaitan dengan penelitian, khususnya *literatur review* yang menjadi fokus pada kepemimpinan Ahok yang dibahas dimana ditandai dengan Transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini akan melalui penyaringan literatur yang dikumpulkan dengan kriteria efektif dan efisien. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis detail terkait dengan literatur yang dipilih, termasuk dengan pengkodean tematik, untuk mengidentifikasi topik utama yang akan membawa karakteristik gaya kepemimpinan Ahok.

Proses untuk mendapatkan pandangan yang baik yang lebih inklusif dan objektif dari gaya kepemimpinan Ahok, ini sering dirasakan berbeda dengan kelompok yang lainnya. Untuk memperbanyak analisis, penelitian ini juga memperhatikan konteks secara sosial, politik dan budaya yang menjadi dasar dari gaya kepemimpinan Ahok, dan bagaimana faktor ini nantinya mempengaruhi penerimaan publik terhadap gaya kepemimpinannya yang tegas.

Studi literatur ini juga memperhatikan dampak serta kosekuensi dari kepemimpinannya Ahok pada berbagai pandangan yang berbeda bagi kehidupan rakyat Jakarta, termasuk pembangun perkotaan, layanan publik, pembangunan ekonomi, dan perubahan dalam budaya birokrasi. Kerangka kerja analitik yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan beberapa teori seperti kepemimpinan transformasional, kepemimpinan situasional, serta konsep manajemen dalam pemerintahan yang ada di perkotaan.

Pendekatan ini memungkinkan para peneliti nantinya untuk mempelajari gaya dan konteks dari kepemimpinannya Basuki Thahaja Purnama atau yang sering disapa Ahok secara mendalam, dan memahami bagaimana beliau memimpin semasa jabatannya sebagai mantan gubernur Jakarta yang sudah menjabat 2 periode serta berinteraksi dengan dinamika yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini membahas gaya kepemimpinan transformatif dari Basuki Thahaja Purnama atau Ahok selama masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta (2014-2017). Artikel ini menyoroti tiga karakteristik utama yang menonjol dari gaya kepemimpinannya: ketegasan dalam pengambilan kebijakan, transparansi dalam tata kelola pemerintahan, serta pendekatan inovatif dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Saya meyakini bahwa gaya kepemimpinan Ahok layak



menjadi bahan pembelajaran dan renungan bagi siapa pun yang percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari atas, dengan keteladanan.

Ahok adalah sosok pemimpin yang berani mengambil keputusan penting demi kemajuan bersama. Ketegasannya mencerminkan komitmen kuat terhadap perubahan. Menurut saya, justru di situlah kekuatannya. Contohnya penataan Kalijodo, sebuah kawasan yang tadinya dikenal sebagai tempat hiburan malam, berhasil ia ubah menjadi taman ramah anak. Ini bukan semata-mata soal penertiban, melainkan soal keberanian mengambil risiko politik demi kepentingan publik.

Ketegasan Ahok dalam menjalankan kebijakannya menunjukkan karakternya sebagai pemimpin yang mampu mengubah keadaan dan tidak takut menghadapi tantangan besar serta selalu berani untuk mencoba hal-hal baru. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Bass dan Avolio (2002) yang menyatakan bahwa seorang pemimpin yang mampu mengubah keadaan harus memiliki keberanian untuk melakukan perubahan penting demi kemajuan organisasi. Ahok, dalam hal ini, dengan berbagai kebijakannya yang kreatif, telah menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga berani membawa perubahan yang bertujuan untuk perbaikan jangka panjang. Keberaniannya dalam mengambil keputusan yang diperdebatkan, seperti perencanaan infrastruktur atau kebijakan publik yang tidak populer, mencerminkan visi besar untuk membawa Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan lebih maju. Dalam konteks ini, kepemimpinan Ahok dapat dilihat sebagai contoh nyata dari konsep kepemimpinan yang mendorong kemajuan organisasi dan masyarakat.

Yang paling dikagumi dari komitmennya ialah terhadap transparansi. Di tengah banyaknya keluhan soal anggaran siluman dan praktik birokrasi gelap, Ahok justru memilih untuk membuka lebar-lebar jalur informasi lewat sistem e-budgeting. Langkah ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga simbol dari niat baik seorang pemimpin yang ingin rakyatnya tahu ke mana uang mereka pergi. Penggunaan e-budgeting di DKI Jakarta di bawah pimpinan Ahok dapat dilihat sebagai langkah yang cerdas, tidak hanya meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam manajemen keuangan daerah, tetapi juga berhasil mengurangi kemungkinan munculnya praktik korupsi dalam tahap penyusunan anggaran. Inovasi ini memberikan kepada masyarakat kemampuan untuk memantau pengaturan dan penggunaan anggaran secara langsung, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Di samping itu, Ahok juga memanfaatkan media digital dengan menyelenggarakan rapat-rapat yang dapat diakses langsung melalui akun YouTube resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan ini memberi peluang kepada publik untuk secara langsung mengawasi pelaksanaan pemerintahan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam pengembangan kota. Tindakan-tindakan tersebut sangat sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. Dengan menekankan pada transparansi, Ahok berhasil memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.

Kebijakan transparansi Ahok tidak sebatas pada pengelolaan anggaran saja, tetapi bagaimana meliputi akses terhadap informasi yang lebih terbuka. Seperti pembaruan sistem pelayanan informasi publik melalui pengembangan portal data terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses data pemerintahan secara *online*. Ide ini merupakan bagian dari komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi dan pemerintahan yang lebih



transparan.

Hal lain yang menjadi perhatian dari gaya kepemimpinannya Ahok ialah pendekatan yang terbilang inovatif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, meski dikenal dengan gaya komunikasinya yang tegas, beliau mampu untuk memberikan perubahan dalam membuka saluran komunikasi bersama masyarakat Jakarta. Salah satu perubahan yang ia lakukan adalah pengembangan aplikasi *Qlue*, yang memungkinkan warga melaporkan berbagai masalah yang sering dihadapi di kota besar seperti Jakarta dan dilaporkan secara langsung kepada pemerintahan kota.

Aplikasi ini memungkinkan warga Jakarta melaporkan langsung persoalan lingkungan dan pelayanan publik kepada pemerintah. Ahok juga aktif blusukan, mendatangi langsung lokasi-lokasi bermasalah. Inilah bentuk kepemimpinan yang saya nilai partisipatif: tidak menunggu laporan datang, tapi menjemput keluhan rakyat. Penggunaan teknologi informasi seperti *Qlue* dalam menjalankan pemerintahan merupakan pendekatan yang lebih inovatif dalam memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan adanya respon positif dari masyarakat terhadap keluhan warga dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. “implementasi aplikasi *Qlue* merupakan perubahan dari pendekatan inovatif Ahok dalam memanfaatkan teknologi untuk memperkuat partisipasi warga dalam membangun kota” (Lestari, 2018).

Selain itu, Ahok juga dikenal dengan program “Blusukan” yang diangkat untuk menjalin komunikasi langsung dengan warga Jakarta. Dengan menggunakan program Ahok secara bergantian mengunjungi berbagai wilayah yang ada di DKI Jakarta secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan seorang pemimpin untuk mendapatkan informasi atau pengaduan langsung dari warga tanpa melalui perantara. Dalam hal lain Hariyanti (2019) juga menjelaskan bahwa meskipun gaya komunikasi Ahok yang sering dipandang negatif oleh masyarakat, pendekatan yang inovatif ini telah berhasil meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah DKI Jakarta selama masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pendekatan yang inovatif juga dapat dilihat dari keberaniannya dalam mengembangkan konsep baru dalam pengelolaan tata pemerintahan, seperti penggaran berbasis kinerja dan juga dengan sistem kontrak berbasis kinerja untuk pejabat daerah. Menurut Putra dan Widjaja (2023), Inovasi yang mencerminkan kepemimpinannya transformasional Ahok berorientasi pada perubahan sistem dan peningkatan kinerja suatu organisasi. Selain itu juga yang menjadi hal penting selama masa kepemimpinannya yaitu berupa transformatif yang lebih mencolok. Meskipun, demikian hal yang diteliti terhadap dengan gaya kepemimpinannya memerlukan kajian terhadap dengan dampak dan juga tantangan yang dihadapinya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mana menonjolkan sejumlah aspek yang lebih penting dari kepemimpinannya Ahok yang belum dikaji sebelumnya.

Dalam masa kepemimpinannya transformasional Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), perubahan signifikan dalam birokrasi pemerintah daerah tercermin dari penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih modern dan terukur. Berdasarkan kajian Hidayat & Mariana (2018), pendekatan Ahok terhadap reformasi birokrasi memperlihatkan orientasi kuat pada peningkatan akuntabilitas dan efisiensi kerja melalui konsep reward and punishment. Langkah ini mencerminkan sebuah transisi dari birokrasi tradisional menuju birokrasi kinerja, di mana pencapaian hasil menjadi tolok ukur



utama. Penilaian terhadap kinerja tidak lagi hanya bersifat administratif atau prosedural, melainkan berbasis pada outcome yang jelas dan terukur. Sistem ini mendorong aparatur sipil negara untuk tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menunjukkan kinerja yang produktif dan berdampak nyata terhadap pelayanan publik. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan bukan hanya perubahan struktural, melainkan juga mencakup perubahan budaya kerja yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Lebih lanjut, pendekatan inovatif Ahok juga ditandai dengan penguatan integrasi layanan publik melalui pembentukan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagaimana dikemukakan oleh Thamrin (2019). Dari sudut pandang manajemen publik, kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dan simplifikasi dalam administrasi pemerintahan. Dengan menggabungkan berbagai fungsi layanan dalam satu tempat, PTSP tidak hanya memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan kejelasan proses pelayanan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui platform daring memperluas aksesibilitas layanan publik dan mempercepat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Inisiatif ini memperlihatkan bahwa pemimpin transformasional dapat mengarahkan birokrasi ke arah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat urban. Secara keseluruhan, pendekatan Ahok merefleksikan strategi reformasi yang progresif dan berorientasi pada hasil, yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan melalui peningkatan kinerja dan inovasi layanan. Widodo (2020) menyatakan bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilakukan Ahok berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Jakarta. Penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa waktu penyelesaian layanan perizinan berkurang hingga 40% sejak sistem PTSP diimplementasikan. Perubahan ini mencerminkan komitmen Ahok dalam menerapkan prinsip-prinsip New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam administrasi publik.

Dalam konteks visi reformasi yang lebih luas, pengelolaan anggaran dan kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Ahok juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang efisien dan akuntabel. Salah satu langkah inovatif yang patut dicatat adalah implementasi sistem e-budgeting, yang tidak hanya merevolusi proses penganggaran, tetapi juga mengubah cara pandang pemerintah terhadap akuntabilitas fiskal. Sejalan dengan semangat New Public Management yang menekankan transparansi dan efisiensi, sistem ini memungkinkan seluruh proses perencanaan anggaran dapat dipantau secara terbuka oleh publik. Menurut Azhari (2017), e-budgeting hadir sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi struktural dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana akses informasi yang terbuka menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Penulis melihat bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal digitalisasi, melainkan bagian dari upaya sistemik untuk membangun budaya birokrasi yang lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.



Selain itu, strategi reformasi fiskal Ahok menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalkan kapasitas keuangan daerah secara nyata. Dengan memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah, meningkatkan kinerja BUMD, dan mengelola aset publik secara lebih produktif, pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Kurniawan dan Purnomo (2022) mencatat bahwa PAD tumbuh rata-rata 15% per tahun selama masa kepemimpinannya, menunjukkan bahwa reformasi fiskal yang dilakukan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap kemandirian fiskal daerah. Tak hanya itu, penekanan terhadap efisiensi juga terlihat dari keberanian Ahok mencoret program-program yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pendekatan seperti ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan berdasarkan evaluasi kinerja yang terukur. Dari sudut pandang penulis, inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa Ahok tidak hanya membenahi birokrasi dari sisi pelayanan, tetapi juga dari sisi keuangan, sehingga tercipta ekosistem pemerintahan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Ahok juga dihadapkan pada dinamika politik yang menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap gaya dan arah kepemimpinan di Jakarta. Situasi ini menandakan bahwa ruang demokrasi di Indonesia semakin berkembang, di mana setiap kebijakan dan pendekatan pemimpin mendapat perhatian serta respons yang aktif dari masyarakat. Gaya kepemimpinan Ahok yang lugas dan berorientasi pada hasil mencerminkan karakter pemimpin yang ingin mendorong percepatan perubahan dalam birokrasi dan layanan publik.

Fenomena ini juga dapat dimaknai sebagai proses pembelajaran politik bersama, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mitra kritis dalam proses pembangunan. Keterlibatan publik yang semakin aktif menjadi indikator positif dari berfungsinya demokrasi dalam pemerintahan daerah. Dengan meningkatnya interaksi antara pemimpin dan masyarakat, terjadi pertukaran gagasan yang sehat, yang pada akhirnya memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan responsif. Penulis melihat bahwa dinamika ini justru memperkuat karakter kepemimpinan transformasional yang membawa perubahan tidak hanya dalam sistem birokrasi, tetapi juga dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik secara konstruktif.

Justru dalam konteks ini, konflik politik yang muncul memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran publik terhadap proses demokrasi. Prasetyo (2019) menilai bahwa peristiwa tersebut menghidupkan ruang diskusi politik di tengah masyarakat, meningkatkan partisipasi warga dalam menentukan arah kebijakan publik. Penulis melihat bahwa hal ini menunjukkan dinamika demokrasi yang sehat, di mana kebijakan dan kepemimpinan diuji secara terbuka oleh masyarakat. Lebih lanjut, seperti yang dijelaskan oleh Nurmandi dan Purnomo (2023), situasi ini juga merefleksikan benturan antara pendekatan teknokratis yang dibawa Ahok yang sangat berorientasi pada efisiensi dan hasil dengan realitas sosial yang masih sarat dengan identitas kultural dan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, kepemimpinan di ruang publik Indonesia menuntut sensitivitas terhadap konteks sosiokultural tanpa harus mengorbankan orientasi pada kinerja.

Dari berbagai tantangan tersebut, terlihat bahwa kekuatan utama Ahok sebagai pemimpin terletak pada determinasi dan keberaniannya dalam menghadirkan perubahan. Rahman dan Sutopo (2020) menekankan bahwa kepemimpinan seperti ini memiliki dampak signifikan terutama dalam sistem birokrasi yang cenderung resistif terhadap inovasi. Bagi penulis, keberanian mengambil



keputusan yang berisiko dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas menjadi ciri khas dari gaya kepemimpinan transformasional yang mampu memutus siklus stagnasi dalam pemerintahan. Hal ini diperkuat oleh Harini dan Pudjiastuti (2021) yang menyebutkan bahwa transparansi yang diterapkan Ahok menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dalam konteks politik yang sering kali diwarnai oleh kecurigaan publik, keterbukaan informasi menjadi fondasi strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintahan.

Lebih dari itu, pendekatan Ahok yang berbasis data dalam pengambilan keputusan juga mencerminkan orientasi pada kebijakan publik yang rasional dan terukur. Nugroho dan Wijaya (2022) mencatat bahwa penggunaan data dan analisis dalam proses formulasi kebijakan merupakan salah satu cara efektif untuk menjaga objektivitas dan mengurangi intervensi politik partisan. Dari sudut pandang penulis, gaya ini relevan dengan tuntutan tata kelola modern yang menuntut efisiensi serta akuntabilitas tinggi. Dengan pendekatan seperti ini, Ahok tidak hanya membentuk sistem pemerintahan yang lebih profesional, tetapi juga memperkuat posisi birokrasi sebagai motor utama pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik secara luas.

KESIMPULAN

Studi ini meneliti gaya kepemimpinan transformasional Tjahaja Purnama (AHOK) selama masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta dari 2014 hingga 2017. Melalui analisis literatur yang komprehensif, dalam zaman yang menuntut adaptasi cepat dan sistem pemerintahan yang responsif, gaya kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, atau lebih dikenal sebagai Ahok, memberikan pelajaran berharga, bahwa perubahan dalam birokrasi dan pelayanan publik dapat dimulai dari keberanian pemimpin yang berada di puncak kekuasaan. Ahok tampil tidak hanya sebagai seorang pengelola, tapi juga sebagai penggerak perubahan yang berani menghadapi inti masalah dengan pendekatan yang tegas, terbuka, dan inovatif.

Keputusannya untuk menata area seperti Kalijodo bukan hanya tindakan disiplin, melainkan lambang keberanian untuk merombak wajah kota demi kepentingan bersama. Ketegasan yang ditunjukkan tidaklah tanpa konsekuensi, namun mencerminkan kepemimpinan yang tak menghindari risiko, melainkan bersedia bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Penerapan transparansi, seperti melalui sistem e-budgeting dan keterbukaan dalam rapat publik, menjadi langkah fundamental dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di tengah dinamika politik yang rumit dan penuh tantangan, Ahok membuktikan bahwa kejujuran, konsistensi, dan kesediaan untuk menerima pengawasan publik adalah kekuatan yang mampu menghilangkan jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Lebih dari itu, pendekatan partisipatif yang ia kembangkan melalui teknologi seperti aplikasi Qlue dan kebijakan blusukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya penting, tetapi sangat diperlukan dalam membangun kota. Ahok memosisikan teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi sebagai penghubung antara aspirasi warga dan kebijakan publik. Reformasi birokrasi yang dijalankan tidak hanya menitikberatkan pada struktur, tetapi juga mengubah budaya kerja. Dengan sistem yang berbasis kinerja, pelayanan publik menjadi lebih terukur, efisien, dan berfokus pada hasil yang nyata. Di sinilah, Ahok menunjukkan kepemimpinan yang tidak hanya bersedia bertindak, tetapi juga menciptakan sistem yang bisa bertahan tanpa kehadirannya.



Tentu saja, setiap model kepemimpinan menghadapi tantangan. Namun, dari sudut pandang penulis, kepemimpinan Ahok patut dicontoh, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia berani menantang tradisi lama yang membuat birokrasi bergerak lamban. Dalam sosok Ahok, kita mendapatkan gambaran seorang pemimpin yang menggunakan data sebagai dasar keputusan, menjadikan transparansi sebagai nilai fundamental, dan keberanian sebagai panduan moral.

Kepemimpinan seperti inilah yang diperlukan di masa depan pemimpin yang tidak hanya ada di ruang rapat, tetapi juga terjun ke masyarakat; pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang visi, tetapi menunjukkan hasil nyata. Ahok telah membuktikan bahwa revolusi gaya bukan tentang cara berbicara, tetapi mengenai bagaimana cara bekerja dan keberanian untuk mengambil sikap demi perubahan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. W. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Melalui E-Government di DKI Jakarta. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media 1(1)*, 1-14.
- Azhari, M. (2017). Reformasi Birokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Penerapan E-budgeting di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 101-118.
- Dewi, R. S. (2019). Analisis Gaya Kepemimpinan Transformasional Basuki Tjahaja Purnama dalam Penertiban Kawasan Kalijodo. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(2), 76-89.
- Gunawan, R. (2020). Reformasi Birokrasi di Era Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 34-49.
- Harini, S. &. (2021). Membangun Kepercayaan Publik melalui Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 76-92.
- Hariyanti, P. (2019). Komunikasi Politik Kontroversial dan Tingkat Kepercayaan Publik: Studi Kasus Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta. *Jurnal Komunikasi Politik*, 4(2), 145-162.
- Hidayat, R. &. (2018). Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Perilaku Organisasi. . *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 61-78.
- Kusuma, A. J. (2022). Resistensi Masyarakat terhadap Kebijakan Relokasi Pemukiman Bantaran Sungai di DKI Jakarta. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 7(1), 22-38.
- Lestari, D. P. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi: Studi Kasus Implementasi Aplikasi Qlue di DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 110-125.
- Ningsih, A. R. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Gaya Komunikasi Kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 8(1), 45-58.
- Pratama, A. B. (2017). Transparansi Pemerintahan Melalui Media Sosial: Analisis Konten YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Era Kepemimpinan Ahok. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Pemerintahan*, 3(2), 87-102.
- Putra, H. A. (2023). Inovasi Governance dalam Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 5(1), 12-27.
- Rahmawati, D. (2023). Persepsi Masyarakat Kelas Menengah Jakarta terhadap Gaya Kepemimpinan Transformatif Basuki Tjahaja Purnama. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 8(1), 67-82.



- Ramadhan, F. (. (2021). Visi Jangka Panjang dalam Kebijakan Pengendalian Banjir: Studi Kasus Normalisasi Sungai Ciliwung pada Era Kepemimpinan Ahok. . *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 6(2), 123-138.
- Suharyanto, A. (2020). Blusukan sebagai Strategi Komunikasi Politik: Studi Kasus pada Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta. *Jurnal Komunikasi Politik*, 5(1), 56-71.
- Sutrisno, E. (2018). Penerapan Sistem Reward and Punishment dalam Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Era Kepemimpinan Ahok. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 201-216.
- Wibowo, A. (2021). Transformasi Fisik Kota Jakarta pada Era Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 7(2), 134-149.
- Widiyaningsih, P. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Era Kepemimpinan Ahok. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 7(1), 45-60.